PERAN HUMAS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN NABIRE PROPINSI PAPUA

SIKRIPSI

Disusun Oleh :

NAMA : DORTEUS YOU

NIM : 10531022

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ''APMD''

YOGYAKARTA

2016

APMD SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 17 YOGYAKARTA

SKRIPSI

PERAN HUMAS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN NABIRE PROPINSI PAPUA

Diajukan Sebagai Syarat Menempuh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Komunikasi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ''APMD''
Yogyakarta

Disusun Oleh
DORTEUS YOU
10531022

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ''APMD''
YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S 1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Masyarakat Desa ''APMD'' Yogyakarta Pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	23 November 2016
P u k u l	:	09:00 WIB
Tempat	:	Ruang Ujian Skripsi STPMD ''APMD'' Yogyakarta 2016

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Habib Muhsin , S.Sos, M. Si Ketua / Penguji /pembimbing	
Theodorus Woryantono, S. IP, M. Hum Penguji Samping I	
Tri Agus Susanto S. Pd, M. Si Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Ade Chandra, S.Sos., M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Dorteus You
NIM	:	10531022
Judul Skripsi	:	**PERAN HUMAS DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN NABIRE PROPINSI PAPUA**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar pustakan. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini.

Yogyakarta, 2 Desember 2016

Dorteus You

Nim: 10531022

HALAMAN MOTTO

"Orang- orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka terinspirasi karena menjadi terinspirasi karena mereka lebih kerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi"

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika memang hal itu kerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak"

- *Dorteus You*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Menyadari bahwa proses pendidikan yang saya tempuh tidak dapat saya selesaikan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi, maka skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah membantu saya dalam proses pendidikan saya:

1. Kedua orangtua saya yang sangat cintai dan kasihi, Ibu Mudesta Tekege (Almarhum) dan Bapak Thomas You (Almarhum)yang telah melahirkan, sehingga selanjutnya Bapak angkat Isak Tekege dan Mama angkat Magdalena You yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang, dan juga yang telah membiayai semua proses pendidikan saya.
2. Sanak saudara dan keponakan yang membiayai proses pendidikan saya, Bapak Yulianus You, Bapak Yohanes You, Bapak Kornelis You (Almarhum). Mereka adalah pahlawan-pahlawan dalam seluruh proses pendidikan saya, walaupun mereka sendiri harus menderita dalam hidupnya.
3. Kekasiku Ferinanda Tatogo yang memberikan motivasi dan bantuannya. Terima kasih dalam proses pendidikan saya dan proses hidup saya, sehingga hidup ini benar-benar memiliki warna tersendiri.
4. Kawan-kawan maupun abang-abang senior dari Organisasi GMNI terutama, Yemi Kudiai, Yesaya Tiluata, Rismon, Bung Sasuka yang telah memberikan motivasi untuk belajar berdiskusi dan tukar pikiran satu sama lain selama pendidikan saya.

5. Kawan-kawan mahasiswa Papua diYogyakarta sekalipun komonitas Enaimokabo / kelompok diskusi terutama, Alfridus Dumopa, Donatus Mote, Damianus Goo, Selpianus Adii, Yerino Madai, Yermias Dogomo, Yohanes Waine, Stepanus Bukega, Soni Tenouye, Henok Mote, Aser Yeimo, Agustian Tatogo, Lazarus Goo, Yosina Degei, Gergoria Tekege (Almarhum), Sepannya Tebai (Almarhum), Maikel Tekege. Bagian mereka yang kaka tingkat dan ade tingkat yang saya sebutkan, Merpis Kadepa, Albertus You, Maksimus Mote, Abiut Gobai, Aser Yeimo, Agustinus Dogomo, Demianus Nawipa, Oktomarko Pekei, Yulius Pekei, Jemi Kudiai, Yanuarius Goo, Isak Waine, Andi Pigai, kawan-kawan yang membantu dalam proses pendidikan dalam hal kekurangan saya berupa uang dan ilmu pengetahuanya.
6. Oranganisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paniai pernah menjabat sebagai Bendahara.
7. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘’APMD’’ Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur, hormat dan pujian penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Agung atas segala anugerahNya, terutama atas pertolonganNya dalam menyelesaikan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ‘’Peran Humas Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Nabire Propinsi Papua’’ ini. Penyusun menyadari bahwa dalam menulis Karya Ilmiah (Skripsi) ini penyusun mengalami berbagai kendala berupa keterbatasan biaya penelitian dan penyusunan, keterbatasan data, dan kendala lainnya,namun semuanya dapat diatasi atas pertolongan Allah Yang Agung melalui berbagai fihak yang membantu saya dalam kesulitan tersebut.

Sebagai salah satu syarat sebagai bagi mahasiswa Strata satu (S-1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa ‘’APMD’’ dalam menyelesaikan pendidikannya, maka setiap mahasiswa diharuskan untuk menyusun sebuah karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat tersebut.

Penyusun menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi) ini tidak dapat selesaikan tanpa bantuan berbagai fihak yang membantu saya. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos; M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD ‘’APMD’’ Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Komunikasi di Jurusan Ilmu Komunikasi (IK).

2. Bapak Ade Chandra S. Sos, M.Si Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Skripsi.
3. Bapak Habib Muhsin, S.Sos; M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Keluarga yang selalu menjadi dukungan dan motivator selama massa kuliah hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Semua kawan-kawan baik dekat maupun yang jauh, yang menjadi motivator, panutan, penghibur, dimana berada, kalianlah yang memberikan warna dalam kehidupan penulis.Kalian adalah berkat patut penulis syukuri.
6. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membatu memberikan kontribusi hingga sikripsi ini terlesaikan, terima kasih rasa hormat dan terima kasih dari penulis.
7. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran sumbangan pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi semua pihak.

Namun, penyusun menyadari bahwa karya ilmiah (Skripsi) ini perlu disempurnakan karena mempunyai banyak kekurangan, baik berupa teori yang terbangun maupun ketersediaan data dalam membahas masalah Peran Humas Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Untuk dapat menyempurnakan kekurangan tersebut, penyusun sangat

terbukamenerima saran dan kritik dari berbagai fihak yang simpati dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap untuk siapa saja yang membaca dan memahami isi karya tulis (Skripsi) ini dapat terlihat secara aktif dalam mencari solusi masalah Peran Humas Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Penyusun

Dorteus You

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
ABTRAKSI xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Mamfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 8
1. Hubungan Masyarakat 8
2. Krisis 26
3. Good Governance 36
F. Kerangka Pikir 42
G. Metologi Penelitian 45
1. Lokasi/SettingPenelitian 45
2. JenisPenelitian 45
3. Sumber Data 45
4. Teknik Pengumpulan Data 46
5. Teknik Analisis Data 47
BAB II LOKASI PENELITIAN 48
A. Sejarah Singkat Kabupaten Nabire 48
B. Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Nabire 55
C. Kondisi Pengawai Bagian Humas Kabupaten Nabire 68

D. Sarana Prasarana 70
BAB III SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 72
A. Data Informan 72
B. Kedudukan Hubungan Masyarakat 73
C. Peran Humas Kabupaten Nabire Dalam Mewujudkan Good Governance 74
1. Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan 76
2. Sub Bagian Protokol 82
3. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) 84
4. Sub Bagian Sandi Telekomunikasi 87
D. Hubungan Dengan Publik Sebagai Jembatan Menujuh Good Governan 91
E. Krisis Di Tengah Upaya Good Governance 97
F. Upaya yang dilakukan Bagian Humas Dalam Mengatasi Masalah 104
a. Dialog Publik Di Media Televisi 106
b. Dialog Pulik di Media Radio 107
c. Penyediaan PO BOX 999 108
d. Tidur desa Program 108
e. Coffe Morning 110
G. Pembahasan 112
BAB IV KESIMPULAN 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 117
DAFTAR PUSTAK
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya keberadaan Hubungan Masyarakat dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan kehumasan dilingkungan pemerintahan merupakan satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat luas, dan harus dilaksanakan secara maksimal. Sehingga legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik menjadi semakin tinggi sejalan dengan responsifnya kebijakan dan program pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian sampai sekarang masih banyak orang yang belum mempunyai pengertian yang benar tentang fungsi Hubungan Masyarakat terhadap suatu gerak usaha organisasi pemerintah kabupaten. Bahkan masih banyak pula orang yang menganggap public relations atau Hubungan Masyarakat sebagai pekerjaan sepele atau sekedar juru foto hal ini tentu menjadi tantangan bagi praktisi Hubungan Masyarakat lebih meningkatkan kinerja dan profesiobalitasnya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi Hubungan Masyarakat. Apalagi perkembangan era saat ini, di tengah-tengah gegap gempitanya otonomi menuju pemerintahan yang baik *(good governance)* yang bertumpu pada akuntablitas, transparansi dan partisipasi, Hubungan Masyarakat diharapkan mampu menjembantani organisasi dengan publik melalui informasi yang akuntabel, transparan dan partisipasif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Peran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, dan untuk mendiskripsikan upaya Bagian Humas dalam mewujudkan *good governance*.

Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, maka dalam analisisnya jumlah atau volumenya tidak diperhitungkan. Penarikan sampel dilakukan secara purposive yaitu diambil yang sesuai atau memenuhi tujuan penelitian saja. Teknik penelitian utama dilakukan dengan cara wawancara nara sumber, kemudian observasi atas kegiatan, peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Nabire serta studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, menyesuaikan tujuan penelitian untuk menunjang dan melengkapi bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa meskipun Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Nabire dalam menjalankan peran dan fungsinya belum optimal, tetapi dalam upaya untuk mewujudkan good governance melalui penciptaan transparan dan partisipatif telah menunjukkan keseriusan, hal ini terlihatdari dibukanya ruang komunikasi timbal balik melalui beberapa program yang dikemas seperti dialog intraktif melalui televisi dan radio, penyediaan PO BOX 999 dan kegiatan Tidur Desa upaya menjaring aspirasi masyarakat secara lansung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan Pemerintah Indonesia telah mengalami beberapa fase. Ketika masa orde baru pemerintah menerapkan pola perencanaan pembangunan terpusat (*top down planning).* Dalam hal semua kebijakan maupun arus informasi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat hampir tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi pola ini ternyata tidak relevan lagi ketika masyarakat dengan berhembusnya angin reformasi masyarakat dengan gigih berusaha untuk melakukan pembaruan, berusaha untuk menegakkan demokratisasi menuntut transparan pemerintah dalam penyelenggara pemerintahan yang baik.

Seiring dengan dinamika masyarakat dengan segala tuntutan dan melatarbelakangi adanya otonomi daerah, pola pemerintahan pun telah berubah dengan mendasar pada perencanaan dari bawah (buttom up planning). Dengan pola seperti ini diharapkan perencanaan pembangunan merupakan informasi dapat tumbuh dari masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan.

Dalam iklim demokrasi dan transparansi seperti sekarang ini, informasi mempunyai peran sangat penting. Informasi senantiasa dibutuhkan semua orang baik selaku individu maupun kelompok masyarakat, sedangkan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi untuk

dapat hidup dan bersaing dengan kondisi sekarang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sangat diperlukan menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka menjadi sangat wajar ketika memasuki era reformasi, masyarakat senantiasa menuntut kemudahan memperoleh informasi yang berkualitas, lengkap secara keseluruhan dari pemerintah. Kecenderungan masyarakat menuntut kebebasan memperoleh informasi dari waktu kewaktu semakin meningkat, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk pelayanan informasi yang cepat, benar dan akurat kepada masyarakat akhirnya bisa nampak good governance.

Pemerintah dapat menjamin dan memberikan pelayanan informasi yang baik, diperlukan sebuah lembaga yang menangani jalannya informasi dan keluhan, baik dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Ada beberapa lembaga telah dibentuk oleh pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertanggun jawab dan bertugas memberikan pelayanan publik di bidang informasi,sepertinya lembaga kehumasan untuk dipertahankan good governance. Dengan adanya hubungan masyarakat menjadi sangat penting dalam perannya menyukseskan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu indikator keberhasilan penyelengara tata pemerintahan adalah dapat terinformasikannya kumpulan kebijakan (policy) dan produk-produk regulasi pemerintah terdokumentasikannya setiap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan baik dan professional. (Ujang Sudirman,2004:41).

Pelaksanaan kehumasan di lingkungan pemerintah salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat luas, dan harus dilakukan secara maksimal. Sehingga legitimasi pemerintah sebagai penyelengaraan pelayanan publik menjadi semakin tinggi sejalan dengan responsifnya kebijakan danprogram pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Adapun BagianHubungan Masyarakat Kabupaten Nabire, sebagai instrumen pemerintah Kabupaten Nabire dalam pelayanan publik di bidang informasi dan keluhan kepada masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi saat ini, agar mampu memberikan informasi yang diharapkan masyarakat. Selain dari Bagian Hubungan Masyarakat harus mampu membangun kredibilitas, karena masyarakat menjadi komunikan heterogen dan sarat dengan berbagai kepentingan, sementara out put dari hubungan masyarakat sifat abstrak tetapi memiliki harga sosial yang harus dipertaruhkan. Citra diri Pemerintah Kabupaten tergantung pada kemampuan Bagian Hubungan Masyarakat dalam mengangkat image positif lembaga pemerintah Kabupaten di mata msyarakat. Maka peran dan fungsi Hubungan Masyarakat ke depan sangat strategis dalam mengkomunikasikan, mengkordinasikan dan menginformasikan peraturan, kebijakan, program dan informasi kegiatan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan memberikan informasi dan keluhan kepada masyarakat. Bagian Hubungan Masyarakat harus pula menerapkan menejemen informasi yang efektif dan profesional, namun demikian akan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem informasi, sehingga pesan-pesan

pemerintahandapat dengan cepat sampai ketujuan, dan umpan balik dari obyek komunikasi yaitu masyarakat dapat memberikan informasi dan keluan, pada akhirnya pemerintah sebagaimana mestinya dengan mewujudkan good governance di Kabupaten Nabire.

Dalam hal iniHubungan Masyarakat dan juga biasa disebut public Relation sebenarnya peran penting dalam sebuah organisasi. Sebab pada dasarnya tujuan dari dibentuk Hubungan Masyarakat untuk menciptakan hormonis antara organisasi dengan publiknya. Atau secara spesifik tujuan Hubungan Masyarakat meliputi dua aspek yaitu aspek positif dan defenisif. Secara positif tujuan Hubungan Masyarakat adalah membela diri terhadap pendapat maupun kesan negatif publik atau pemerintahan dan masyarakat.

Dalam konteks ini membela diri bukan berarti semata-mata mencari kemenangan, namun merupakan bentuk usaha meyakinkan public, dengan cara memberikan penjelasan disertai argumentasi yang rasional, serta berusaha sesuatu kebijakan yang dilakukan lembaga atau organisasi dapat diakui dan diterima masyarakat menjadi sesuatu yang baik. Begitu pula di Kabupaten Nabire, dengan membentuk Bagian Hubungan Masyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang hormonis diantara unit kerja atau satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire antara pemerintah kabupaten bahkan masyarakat.

Namun demikian sampai sekarang masih banyak orang yang belum mempunyai pengertian yang benar tentang fungsi Hubungan Masyarakat dalam suatu gerak usaha organisasi pemerintah kabupaten. Bahkan masih

banyak pula orang menganggap publik relation atau Hubungan Masyarakat sebagai pekerjaan sepele atau sekedar juru foto; sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan pers dan media massa, sehingga pada saat beredar berita yang kurang sedap tentang pemerintah atau jalannya pemerintahan, Hubungan Masyarakat yang dipasang pertama kali untuk menutup dan memdambakan "kobaran''berita tersebut.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi praktisi Hubungan Masyarakat untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi Hubungan Masyarakat agar keberadaan dan fungsi yang sebenarnya dapat diketahui dan diakui public. Apalagi perkembangan era saat ini, di tengah-tengah gegap gempitannya otonomi daerah wacana mewirausahakan birokorasi guna menuju pemerintahan yang baik (good governance) yang bertumpu pada akuntablitas, transparansi dan partisipatif dalam mewujudkan good governance.

Penulis memandang dalam hal ini peran Hubungan Masyarakat menjadi sangat penting bagi pelayanan public dari pemerintahan mengupayakan memberikan informasi dan keluan kepada masyarakat dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Kemitraan dapat terjaling program, kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah diketahui, dimengerti dan terima oleh publik. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik antara oganisasi dan publik. Sehingga tidak berlebihan apabila public relation atau Hubungan Masyarakat dijadikan jembatan komunikasi antara public dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi

yang baik maka pertukaran informasi antara organisasi dan publik pun diharap tidak tersumbat dan sekaligus dapat meminimalkan permasalahan atau krisis yang dimungkinkan timbul akibat adanya miskomunikasi antara pemerintah dan publik. Dengan demikian sejauh mana akuntablitas transparan dan partisipasi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan salah satunya dapat diketahui melalui informasi yang dikeluarkan oleh Hubungan Masyarakat.

Dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis mengambil judul: ***PERAN HUMAS DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN NABIRE PROPINSI PAPUA***

B. Rumusan Masalah

Good governance merupakan sebuah model pemerintah ideal yang diharapkan dapat terwujud di negara kita saat ini. Namun untuk mewujudkan *good governance* bukanlah sesuatu yang mudah, dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pelaku, pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu saja mempunyai peran yang sangat besar dalam tercapainya *good governance* karena bagaimanapun pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan yang perlu merumuskan cara untuk mewujudkan *good governance* sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak terkecuali Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Dessy Anwar 2001. ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.** Surabaya: Karya Abditama

Dessy Anwar 2001. ***Kamus Lengkap, Inggris – Indonesia, Indonesi Inggris. Surabaya: Ameli***

Dja'far H. Assegaff 1982. ***Hubungan Masyarakat Dalam Praktek***. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hubertus Sutopo 2000. ***Metologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan terapan dalam penelitian).***Suarakarta: Pusata Penelitian Univertitas Sebelas Maret

Hadari Nawawi 1995. ***Metode Penelitian Bidang Sosial.*** Yogyakarta: Gajah Mada University Press

IGusti Ngurah Putra 1999. ***Manajemen Hubungan Masyarakat***. Yogyakarta: Univertitas Atmajaya

Jalaludin Rahmat 1998. ***Metode Penelitian Komunikasi*.** Bandung: Remaja Rosdakarya

Jhon P. Simanjuntak dkk 2003. ***Publik Relation.*** **Y**ogyakarta: Graha Ilmu Lembaga Informasi dan Komunikasi. Jakarta

Lexy J. Moleong 1998. ***Metode Penelitian Kualitatif.***Bandung: Remaja Rosdakarya Masri

Singarimbun dan Sofian efian Effendi 1989. ***Metodologi Penelitian Survei***.Jakarta: LP3ES

M. Idrus 1999. ***Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani***. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Noeng Muhadjir 1989. ***Metologi Penelitian Kualitatif***. Yogyakarta: RakeSarasinPO BOX 83

Oemi Abdurrachman 2001. ***Dasar-dasar Public Relations***. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rhenald kasali 2003. ***Krisis Publik Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia***. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Redi Panuju 2002. ***Krisis Publik Relation.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar

S. Nasution 1992. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung: Tarsito

S. G. Hunneryager dan I. L. Heckman. 1992. ***Partisipasi dan Dinamika Kelompok***. Semarang: Dahara Prize

Soetomo 1990. ***Pembangunan Masyarakat Desa di beberapa Negara Sedang Berkembang***

Suharsimi Arikunto 1990. ***Manajemen Penelitian.*** Jakarta: Rineka Citra

Sosilo Bambang Yudoyono. 2003***. Revitalisasi Ekonomi Indonesia.*** Jakarta: Giliran Timur

Tommy Suprapto dan Fahrianoor. 2004. ***Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori Praktek***

Ujung Sudirman. 2004. ***Makalah Peranan Humas Pemerintah dan DaerahdalamMewujudkan Good Governance.*** Jakarta

http://nabirekab.go.id/portal/sejarah